



Efektivitas Regulasi Investasi di Indonesia dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Dona Chania

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: donachania1994@gmail.com

Abstract. *Investment regulations have an important role in encouraging economic growth and increasing national competitiveness. This research aims to analyze the effectiveness of investment regulations in Indonesia, especially in the context of attractiveness for domestic and foreign investors. This research method uses a qualitative approach with policy analysis and secondary data. The research results show that although various regulations such as the Job Creation Law have been implemented to facilitate investment, bureaucratic challenges and legal uncertainty are still the main obstacles. This research recommends strategic steps to improve the implementation of investment regulations to strengthen national economic competitiveness.*

Keywords: *investment regulations, economic competitiveness, investment policy, Indonesia.*

Abstrak. Regulasi investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi investasi di Indonesia, terutama dalam konteks daya tarik bagi investor domestik maupun asing. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja telah diterapkan untuk mempermudah investasi, tantangan birokrasi dan ketidakpastian hukum masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan implementasi regulasi investasi guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Kata Kunci: regulasi investasi, daya saing ekonomi, kebijakan investasi, Indonesia.

PENDAHULUAN

Investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi, investasi memberikan kontribusi besar terhadap penambahan modal, pengembangan teknologi, dan peningkatan daya saing suatu negara. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompetitif, daya saing ekonomi nasional menjadi faktor penentu keberhasilan suatu negara dalam menarik arus investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (Omnibus et al. 2024)

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi. Beragam sumber daya alam, populasi usia produktif yang tinggi, dan posisi geografis yang strategis memberikan keuntungan kompetitif bagi Indonesia. Namun, berbagai tantangan struktural, seperti kompleksitas regulasi, inefisiensi birokrasi, dan ketidakpastian hukum, telah menjadi hambatan bagi investasi yang optimal. Berdasarkan laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) yang diterbitkan Bank Dunia, meskipun peringkat Indonesia telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir,

sejumlah indikator seperti perlindungan investasi minoritas dan efisiensi perizinan masih menunjukkan kelemahan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah reformasi untuk meningkatkan iklim investasi. Salah satu upaya signifikan adalah penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, memperbaiki sistem perizinan, dan menghilangkan berbagai hambatan investasi yang telah lama menjadi masalah. Dengan penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan penyediaan insentif investasi di berbagai sektor, diharapkan Indonesia dapat menarik lebih banyak investor dan memperbaiki daya saing ekonomi.(Rohyati et al. 2024)

Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun reformasi kebijakan telah dilakukan, implementasi di tingkat daerah dan keberlanjutan reformasi sering kali menghadapi berbagai kendala. Ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah, resistensi sosial terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta ketidakpastian hukum sering kali membuat investor berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana regulasi investasi di Indonesia efektif dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mengevaluasi kebijakan regulasi investasi di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan. Fokus penelitian ini adalah pada upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional melalui perbaikan regulasi, dengan mengacu pada indikator global seperti Global Competitiveness Index (GCI) dan EoDB.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas regulasi investasi di Indonesia, sekaligus menjadi bahan acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki iklim investasi. Dengan regulasi yang lebih efektif, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.(Purnomo 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan pemerintah, studi akademik, dan data dari lembaga internasional. Pendekatan kebijakan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi, sementara analisis daya saing didasarkan pada indikator Global Competitiveness Index (GCI) dan Ease of Doing Business (EoDB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai reformasi regulasi investasi di Indonesia, penting untuk memahami konteks dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Sejak beberapa dekade terakhir, globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap perekonomian global. Negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dan meningkatkan investasi domestik guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(Purnomo 2024)

Namun, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural yang menghalangi arus masuk investasi. Tantangan ini meliputi kompleksitas birokrasi, ketidakpastian regulasi, biaya transaksi yang tinggi, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Beberapa sektor juga masih menghadapi ketidakstabilan politik dan hukum, yang mempengaruhi iklim investasi. Selain itu, masih terdapat banyak peraturan yang tumpang tindih dan menghambat proses perizinan, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi para investor baik lokal maupun asing.

Peningkatan daya saing ekonomi nasional memerlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kualitas regulasi investasi. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan pro-bisnis. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, diharapkan Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi para investor dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan investasi dan merancang regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan tantangan yang dihadapi.(Agustine et al. 2019)

Reformasi Regulasi Investasi di Indonesia

Penting untuk memulai pembahasan ini dengan memahami latar belakang dari reformasi regulasi investasi di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi titik awal

penting dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Regulasi ini diharapkan dapat menyederhanakan perizinan usaha, meningkatkan kemudahan berbisnis, dan menarik lebih banyak investasi. Salah satu langkah signifikan dalam reformasi ini adalah pengenalan sistem *Online Single Submission* (OSS), yang memungkinkan pengajuan izin usaha secara daring melalui satu portal terpadu. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan memotong waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin, yang sebelumnya memakan waktu lama dan sering kali terhambat oleh berbagai prosedur yang kompleks.

Namun, implementasi OSS di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah teknis, seperti gangguan sistem, lambatnya respons terhadap permohonan, serta minimnya sosialisasi kepada pelaku usaha, menghambat efektivitas dari sistem ini. Banyak pelaku usaha yang mengeluhkan proses yang tidak efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang dijanjikan. Meskipun ada kemajuan dalam memotong jalur birokrasi, masalah seperti lambatnya verifikasi dokumen dan kesulitan dalam mengakses portal OSS masih menghambat arus masuk investasi. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait untuk memastikan OSS dapat berjalan dengan lancar.

Selain sistem OSS, Undang-Undang Cipta Kerja juga mencakup berbagai pasal yang bertujuan untuk memangkas regulasi yang tumpang tindih dan menghilangkan hambatan investasi yang selama ini menghalangi masuknya modal ke Indonesia. Misalnya, perubahan dalam regulasi perizinan tenaga kerja, persyaratan mendirikan bangunan, dan penghapusan izin lingkungan yang sebelumnya diperlukan untuk beberapa jenis usaha. Hal ini diharapkan dapat mendorong investasi, terutama di sektor-sektor yang selama ini dianggap tidak layak oleh investor karena biaya dan prosedur yang mahal. Namun, ada kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa penghapusan atau penyederhanaan regulasi ini dapat mengorbankan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup, yang berpotensi berdampak negatif dalam jangka panjang. (Surya and Bukhari 2019)

Implikasi terhadap Daya Saing Ekonomi Nasional

Penerapan regulasi investasi di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, menunjukkan dampak positif terhadap daya saing ekonomi nasional. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia berhasil mencatatkan peningkatan dalam laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) dari 73 di tahun 2019 menjadi 63 di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam aspek kemudahan berusaha di Indonesia, seperti pengurusan izin, perlindungan investor, dan penegakan kontrak bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa investor merespons positif terhadap reformasi perizinan dan penghapusan

berbagai hambatan birokrasi yang sebelumnya menjadi penghalang utama. Namun, meskipun ada peningkatan, Indonesia masih perlu bekerja keras untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi di skala global, terutama dalam hal kualitas infrastruktur, kestabilan politik, dan inovasi di sektor swasta.

Data dari Global Competitiveness Index (GCI) juga memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing Indonesia masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Beberapa sektor, seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan akses ke teknologi informasi, masih menjadi tantangan. Daya saing ekonomi nasional bukan hanya ditentukan oleh kebijakan regulasi, tetapi juga oleh keberlanjutan pembangunan ekonomi, stabilitas makroekonomi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global. Indonesia perlu memperkuat sektor pendidikan dan riset serta mengembangkan ekosistem inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri kreatif dan teknologi. (Pardede 2023)

Hambatan dalam Implementasi Regulasi Investasi

Meskipun ada langkah-langkah positif dalam reformasi regulasi investasi di Indonesia, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hukum dan konsistensi peraturan di tingkat lokal. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menyederhanakan perizinan dan memperbaiki iklim investasi, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh peraturan daerah yang lebih ketat atau kurang sinkron dengan peraturan nasional. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi investor yang ingin beroperasi di beberapa daerah, karena mereka tidak yakin apakah mereka akan menghadapi masalah dalam perizinan atau tidak. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi investasi.

Selain itu, resistensi sosial terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi hambatan. Beberapa masyarakat menganggap bahwa penghapusan atau penyederhanaan beberapa regulasi, seperti perlindungan lingkungan dan hak pekerja, dapat memberikan dampak negatif dalam jangka panjang. Hal ini memunculkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat terkait manfaat dari regulasi yang baru. Memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana regulasi ini dirancang untuk mendorong investasi tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup sangat penting. (Aidilla 2016)

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Regulasi Investasi

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi investasi di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, diperlukan harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah perlu mengurangi tumpang tindih peraturan yang sering kali membingungkan investor. Menyediakan panduan yang jelas mengenai perizinan dan proses investasi di setiap daerah, serta melakukan sosialisasi secara intensif, dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum. Pemerintah juga perlu menjamin penegakan hukum yang konsisten dan transparan di seluruh wilayah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat diandalkan. (Direktur Jenderal Perhubungan Laut 2020)

Kedua, penguatan sistem OSS menjadi langkah krusial dalam memperbaiki layanan perizinan. Sistem OSS harus lebih responsif, stabil, dan dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan teknis dan penyuluhan bagi para pelaku usaha mengenai cara menggunakan OSS dengan efektif. Selain itu, pengembangan fitur-fitur baru dalam OSS, seperti monitoring proses perizinan dan penyediaan informasi real-time tentang perubahan regulasi, akan membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu bagi pelaku usaha. (Dalam and Tjahjo 2015)

Ketiga, pemberian insentif fiskal bagi sektor-sektor prioritas, seperti teknologi hijau, riset dan pengembangan, serta industri kreatif, harus ditingkatkan. Insentif fiskal dapat berupa pembebasan pajak, subsidi penelitian, atau bantuan modal untuk memacu investasi di sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan inovasi dan teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola investasi juga sangat penting. Pelatihan bagi tenaga kerja yang menangani perizinan investasi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, akan memastikan implementasi regulasi berjalan efektif dan efisien. Dengan peningkatan kapasitas SDM, proses perizinan dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengorbankan aspek transparansi dan akuntabilitas. (Hadi 2016)

Inovasi dalam Sektor Prioritas

Regulasi investasi yang efektif tidak hanya mencakup penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal, tetapi juga mendorong inovasi di sektor-sektor prioritas seperti teknologi hijau, industri kreatif, dan riset dan pengembangan (R&D). Indonesia perlu terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi yang dapat bersaing di pasar global. Regulasi yang memberikan kemudahan akses ke teknologi baru, perlindungan

hak kekayaan intelektual, serta pengembangan ekosistem inovasi yang kuat akan membantu mendorong pertumbuhan sektor-sektor ini.

Pendanaan Investasi

Meningkatkan akses pendanaan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi kunci untuk mengembangkan usaha mereka dalam menghadapi persaingan global. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta perusahaan modal ventura sangat penting. Pemerintah perlu memperbaiki skema kredit dan memastikan kebijakan yang ramah terhadap usaha kecil dan menengah. Regulasi yang memfasilitasi pendanaan melalui platform fintech atau kebijakan kredit yang lebih lunak akan membantu mengatasi masalah likuiditas bagi pelaku usaha kecil. (Surya and Bukhari 2019)

Penguatan Infrastruktur dan Logistik

Pembahasan mengenai regulasi investasi tidak dapat lepas dari aspek infrastruktur dan logistik. Indonesia membutuhkan penguatan infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung arus perdagangan internasional. Penyederhanaan regulasi di sektor infrastruktur melalui pendekatan *build-operate-transfer* (BOT) atau kerja sama pemerintah-swasta (KPS) bisa mempercepat pembangunan proyek infrastruktur yang vital bagi konektivitas antarwilayah. Selain itu, regulasi yang mendukung pengembangan kawasan industri berorientasi ekspor juga perlu didorong agar investasi tidak hanya terkonsentrasi di kota besar.

Koordinasi Pemerintah dan Pengawasan Regulasi

Kunci dari efektivitas regulasi investasi adalah koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta pengawasan yang ketat terhadap implementasi regulasi di lapangan. Keterlibatan berbagai lembaga seperti BKPM, OJK, serta kementerian terkait akan memastikan bahwa semua peraturan berjalan konsisten dan tidak tumpang tindih. Regulasi yang transparan, jelas, dan mudah diakses oleh pelaku usaha juga perlu diperkuat untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian di kalangan investor.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing ekonomi tidak hanya tergantung pada regulasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah perlu fokus pada pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama di sektor-sektor prioritas. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan pelatihan keterampilan digital, kewirausahaan, dan pengetahuan industri 4.0. Penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang dapat menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap memasuki pasar kerja juga merupakan langkah yang strategis.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tambahan ini, regulasi investasi di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan daya saing ekonomi nasional memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada kemudahan perizinan tetapi juga pada penguatan sektor-sektor strategis dan pengelolaan regulasi yang lebih baik. (Akhir n.d.)

Inovasi dalam Sektor Prioritas

Regulasi investasi yang efektif tidak hanya mencakup penyederhanaan perizinan dan insentif fiskal, tetapi juga mendorong inovasi di sektor-sektor prioritas seperti teknologi hijau, industri kreatif, dan riset dan pengembangan (R&D). Indonesia perlu terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi yang dapat bersaing di pasar global. Regulasi yang memberikan kemudahan akses ke teknologi baru, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengembangan ekosistem inovasi yang kuat akan membantu mendorong pertumbuhan sektor-sektor ini.

Pendanaan Investasi

Meningkatkan akses pendanaan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi kunci untuk mengembangkan usaha mereka dalam menghadapi persaingan global. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta perusahaan modal ventura sangat penting. Pemerintah perlu memperbaiki skema kredit dan memastikan kebijakan yang ramah terhadap usaha kecil dan menengah. Regulasi yang memfasilitasi pendanaan melalui platform fintech atau kebijakan kredit yang lebih lunak akan membantu mengatasi masalah likuiditas bagi pelaku usaha kecil.

Penguatan Infrastruktur dan Logistik

Pembahasan mengenai regulasi investasi tidak dapat lepas dari aspek infrastruktur dan logistik. Indonesia membutuhkan penguatan infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung arus perdagangan internasional. Penyederhanaan regulasi di sektor infrastruktur melalui pendekatan *build-operate-transfer* (BOT) atau kerja sama pemerintah-swasta (KPS) bisa mempercepat pembangunan proyek infrastruktur yang vital bagi konektivitas antarwilayah. Selain itu, regulasi yang mendukung pengembangan kawasan industri berorientasi ekspor juga perlu didorong agar investasi tidak hanya terkonsentrasi di kota besar.

Koordinasi Pemerintah dan Pengawasan Regulasi

Kunci dari efektivitas regulasi investasi adalah koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta pengawasan yang ketat terhadap implementasi regulasi di lapangan. Keterlibatan berbagai lembaga seperti BKPM, OJK, serta kementerian terkait akan

memastikan bahwa semua peraturan berjalan konsisten dan tidak tumpang tindih. Regulasi yang transparan, jelas, dan mudah diakses oleh pelaku usaha juga perlu diperkuat untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian di kalangan investor.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing ekonomi tidak hanya tergantung pada regulasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah perlu fokus pada pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama di sektor-sektor prioritas. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan pelatihan keterampilan digital, kewirausahaan, dan pengetahuan industri 4.0. Penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang dapat menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap memasuki pasar kerja juga merupakan langkah yang strategis. (Purnomo 2024)

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional secara berkelanjutan dan menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang lebih menarik di tingkat global. (Akhir n.d.)

KESIMPULAN DAN SARAN

Reformasi regulasi investasi di Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah menghadirkan berbagai perubahan positif dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diperkenalkan bertujuan untuk menyederhanakan perizinan usaha, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan teknis dan koordinasi yang perlu diperbaiki. Peningkatan peringkat dalam laporan *Ease of Doing Business* menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut telah memberikan dampak positif dalam memudahkan proses investasi. Namun, masih ada hambatan seperti ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan peraturan di tingkat daerah yang menghambat kelancaran investasi di beberapa wilayah. Untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia, diperlukan harmonisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan sistem OSS agar lebih responsif dan stabil. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih baik terkait manfaat dari regulasi baru agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Meningkatkan insentif fiskal untuk sektor-sektor strategis seperti teknologi hijau, riset dan pengembangan, serta industri kreatif juga menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan investasi dan penegakan hukum yang konsisten serta transparan akan memastikan regulasi investasi berjalan efektif dan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan langkah-langkah ini,

diharapkan Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dan meningkatkan daya saing di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Tities Eka, M. Yudha Prawira, Boedi Rhesa, and Nur Azizah Febryanti. 2019. "Penyederhanaan Perizinan Usaha Di Daerah." *Kppod* 1(1):7.
- Aidilla, Mia. 2016. "Kebijakan Investasi Asing Di Indonesia Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015." *Jom Fisip* 3(1):1–16.
- Akhir, Laporan. n.d. "Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten Sumba Barat I."
- Dalam, Menteri, and Negeri Tjahjo. 2015. "Penyederhanaan Perizinan Daerah Dorong Investasi."
- Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 2020. "Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut." *Perhubungan Laut* (8):1–167.
- Hadi, Prajogo U. 2016. "Kinerja, Prospek, Dan Kebijakan Investasi Di Indonesia." *Analisis Kebijakan Pertanian* 8(2):151. doi: 10.21082/akp.v8n2.2010.151-165.
- Omnibus, Implikasi, L. A. W. Dalam, Investasi Asing, D. I. Indonesia, Studi Penyederhanaan, and Perizinan Pada. 2024. "Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora." 1(September).
- Pardede, Marulak. 2023. "Dilema Reformasi Regulasi Hukum Investasi Dalam Sistem Hukum Sipil dalam Perspektif Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23(2):231. doi: 10.30641/dejure.2023.v23.231-244.
- Purnomo, Oki. 2024. "JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara Hambatan Kebijakan Investasi Indonesia Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Omnibus Law Obstacles Of Indonesian Investment Policy To Promote Economic Growth Through Omnibus Law." 2202–9.
- Rohyati, Rohyati, Farakh Putri Nur Rokhmah, Haudli Nurfitriah Uskityia Syazeedah, Rista Indah Fitriyaningrum, Gilang Ramadhan, and Muhamad Syahwildan. 2024. "Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi Di Era Digital." *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 3(1):909–18. doi: 10.57141/kompeten.v3i1.133.
- Surya, Aelina, and Ahmad S. Bukhari. 2019. "Peluang Dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia Dengan Negara-Negara Visegrad." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 17(1):13–18. doi: 10.34010/miu.v17i1.2229.